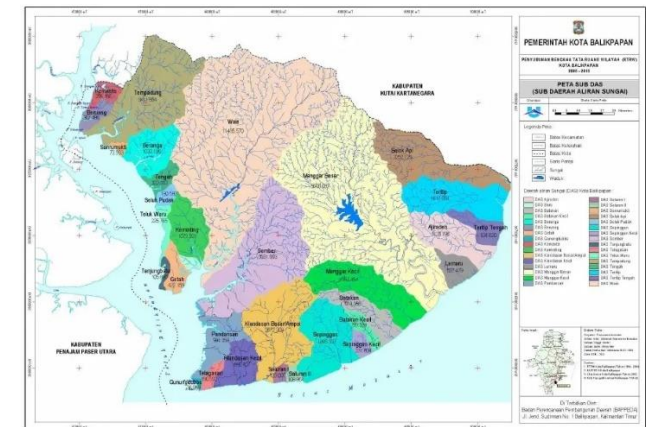


**KOTA
BALIKPAPAN**

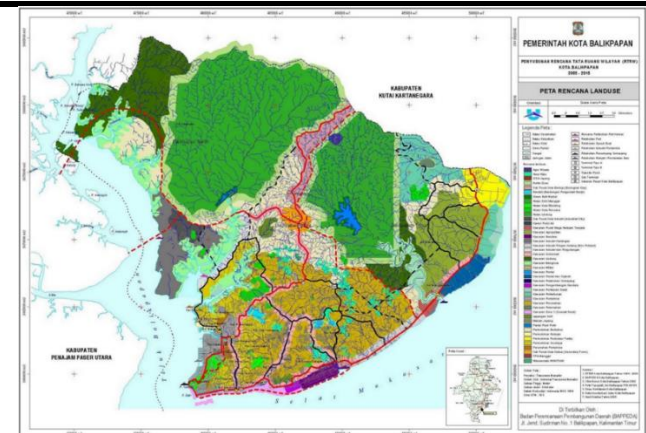
1. PROFIL KOTA

Organisasi teritorial, pembentukan kota Daerah Tk.II Kota BALIKPAPAN ditetapkan pada tanggal 26 Juni 1959, berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang. Wilayah Kota BALIKPAPAN seluas 373.78 Km² meliputi wilayah 16 (enam belas) Kecamatan:

No	KECAMATAN	LUAS KECAMATAN Km2	%	JUMLAH KELURAHAN
1	Balikpapan Selatan	38.81	7.59	7
2	Balikpapan Kota	11.10	2.17	5
3	Balikpapan Timur	119.16	23.32	4
4	Balikpapan Utara	138.24	27.05	6
5	Balikpapan Tengah	10.83	2.12	6
6	Balikpapan Barat	192.87	37.74	6
		511.01	100.00	34.00

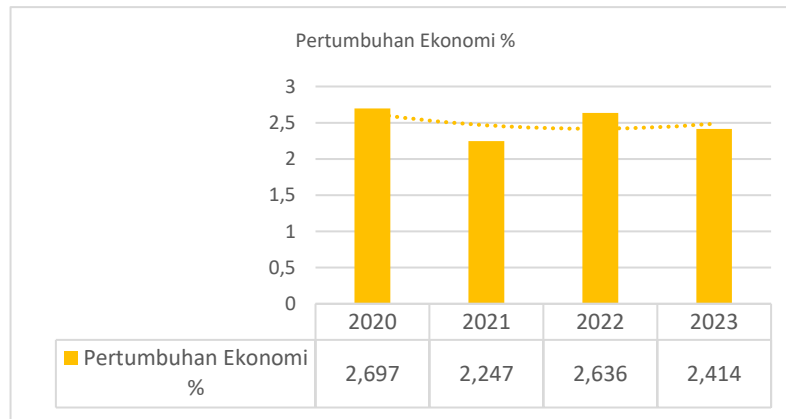


Populasi, Kota BALIKPAPAN, berdasarkan data sensus tahun 2023 sebanyak 738,532 jiwa rata – rata Pertumbuhan penduduk tahunan: 1.94%. Tingkat Kepadatan: 1,445 jiwa/km² , termasuk kedalam kategori rendah



Ekonomi, kondisi perekonomian kota BALIKPAPAN, terdiri dari:

- PDRB ADHK dari tahun 2020 – 2023 menunjukkan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 15.86%, kondisi PDRB ADHK kota BALIKPAPAN setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2021 terjadi penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19. PDRB ADHK Kota BALIKPAPAN ditahun terakhir (2023) sebesar Rp. 3,732,305,262,770
- Pertumbuhan Ekonomi Kota BALIKPAPAN dari tahun 2020-2023 cenderung turun rata rata pertumbuhan pertahun sebesar -0.09% hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid 19, yang sampai dengan saat ini belum adanya tren kenaikan yang significant. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota BALIKPAPAN pada tahun 2023 sebesar 2.41%. (rata rata nasional tahun 2023 sebesar 5,04%)
- Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2020. - 2023 menunjukkan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 0.69%. Pada tahun terakhir (tahun 2023) IPM Kota BALIKPAPAN adalah sebesar 82,03 termasuk kedalam kategori sangat tinggi.
- Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2020 - 2023 rata rata pertumbuhannya pertahunnya menurun sebesar -0.97%.
- Indeks Ketimpangan (Gini Rasio) Kota BALIKPAPAN dari tahun 2020 - 2023 Rata rata 0.33 termasuk kedalam kategori Ketimpangan rendah, berada dibawah rata rata nasional tahun 2023 sebesar 0,388.



Manajemen utilitas: Kota BALIKPAPAN Memiliki 1 Perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang Jasa Penyediaan Air Bersih,, dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut sampai dengan tahun 2023 masih didanai oleh APBD.

Staf kota, Jumlah Pegawai Negeri adalah sebanyak 6,623 orang dengan komposisi jabatan struktural 536 Orang, jabatan fungsional umum 1,080 orang dan jabatan fungsional tertentu 2.652 Orang, sementara P3K 2.355 Orang.

Uraian	PNS			Non PNS
	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	P3K
Pegawai yang tersedia (Eksisting)	536	2,652	1,080	3,744
Total				
%	8.09%	40.04%	16.31%	35.56%
Kebutuhan pegawai Berdasarkan Anjab		848	1,252	
Total				
%		40.38	59.62	

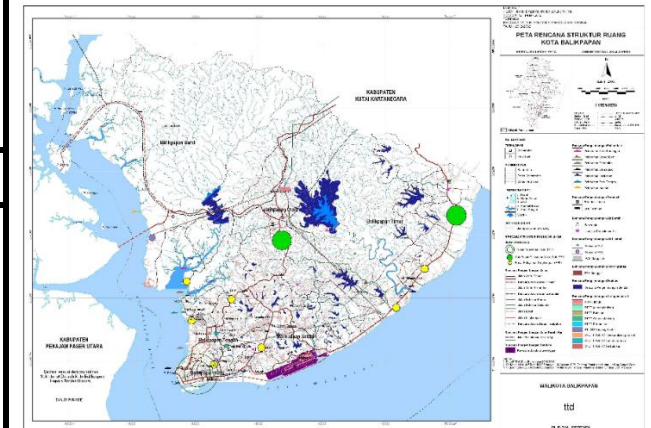
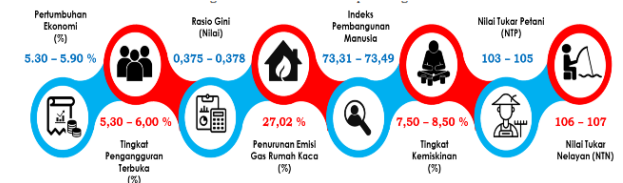
Rencana Investasi Kota BALIKPAPAN berdasarkan data belum ada rencana investasi.

Nama Proyek	Total Perkiraan biaya	Sumber Pembiayaan
Adapun 26 rencana proyek yaitu:		
Pengadaan Rumah Susun		APBD, Swasta, KPBU
Infrastruktur Pengolahan Sampah TPST 3R		APBD, Swasta, KPBU

Isu strategis kota BALIKPAPAN:

1. Lemahnya tata kelola pemerintahan khususnya dari sisi profesionalitas
2. Kurang Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Rendahnya Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia
4. Keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
5. pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan

sasaran pembangunan RKP tahun 2023, antara lain:



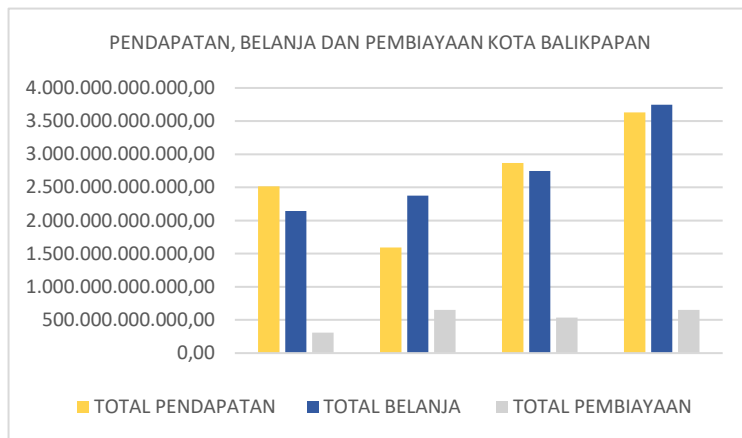
	Revitalasi Kendaraan Umum		APBD, Swasta, KPBU		
	Peningkatan TPAS Manggar		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan IPAL Komunal Kota Balikpapan		APBD, Swasta, KPBU		
	Pengembangan Pelabuhan Sember		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Sekolah Terpadu Balikpapan Utara		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Data Center		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan RS Balikpapan Timur		APBD, Swasta, KPBU		
	Pengelolaan Objek Wisata Pantai Manggar		APBD, Swasta, KPBU		
	Rencana Pengembangan Terminal Angkutan Barang		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Reklame Videotron		APBD, Swasta, KPBU		
	Penyelenggaraan Fiber Optic		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga		APBD, Swasta, KPBU		
	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan SPAM Sepaku Semoi		APBD, Swasta, KPBU		
	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Depo Kontainer & Terminal Angkutan Barang		APBD, Swasta, KPBU		
	Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Jaringan Utilitas Kota		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Jembatan Sember - Kariangau		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Sekolah Terpadu Balikpapan Timur		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Kawasan Olah Raga Terpadu		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Coastal Area		APBD, Swasta, KPBU		
	Pembangunan Kawasan Road Race		APBD, Swasta, KPBU		
Permasalahan Pengelolaan keuangan daerah: - Kurang sinergi stakeholder dalam optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah - Belum optimal pengembangan modernisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah - Informasi terkait Alokasi Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat menunggu penetapan RUU APBN sehingga belum dapat dialokasikan pada Tahap RKPD menyebabkan inkonsistensi RKPD >KUA>APBD - Waktu Pembahasan Penambahan atau Pengurangan Pagu Antar OPD , Walikota , TAPD dan Banggar sangat terbatas - Pembahasan Penambahan dan Pengurangan pagu per OPD tidak dihadiri oleh pejabat yang berkaitan sehingga sering sulit dalam pengambilan kebijakan. - Adanya Pembahasan KUA yang membahas penambahan dan pengurangan Pagu rentan mempengaruhi angka persentase mandatory Spending - Alokasi Belanja Modal pada Tahap APBD belum dapat mencapai 40% dari total APBD karena juga difokuskan untuk mandatory Spending yang lain, pada umumnya dapat dipenuhi di Perubahan APBD - Informasi anggaran Dana Transfer DAU yang ditentukan Penggunaannya, DAK dan DID yang sering terlambat berpengaruh terhadap alokasi pelayanan Dasar - Silpa tidak terperinci per rekening, sehingga rentan dimanfaatkan seluruhnya untuk Belanja Daerah.					
1. SITUASI KEUANGAN¹					
Tabel situasi keuangan				Kurs ² : 1 US \$ = Rp. 16.100,00 Indeks inflasi ³ : indeks inflasi tahun 2020=0.65%, 2021= 2.28%, 2022 = 5.51%, 2023 = 3.60%	
URAIAN	2020	2021	2022	2023	PERTUMBUHAN
TOTAL PENDAPATAN	2,515,508,487,764.14	1,591,326,054,747.69	2,869,130,120,905.73	3,632,425,125,737.23	23%
				• Rata rata Pendapatan Kota BALIKPAPAN dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) adalah sebesar Rp. 2,652,097,447,288.70,- atau pertumbuhan	

¹ Laporan ringkasan pada bagian situasi keuangan kota adalah penjelasan data tahun terakhir

² Kurs terhadap dollar merupakan kesepakatan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yang merupakan titik tengah antara kurs jual dan kurs beli

³ Tingkat infalsi bersumber dari data badan pusat statistic yang ada di daerah

Belanja Operasi	1,594,807,894,013.19	1,744,051,495,995.96	1,915,925,588,616.51	2,331,395,721,553.33	14%
Belanja Tak Terduga	120,435,934,469.68	85,268,846,303.70	33,526,006,109.37	22,464,664,572.00	- 41%
Belanja Transfer	1,271,220,600.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	
TOTAL BELANJA	2,145,207,734,777.38	2,375,021,817,795.28	2,745,398,221,161.00	3,746,603,655,354.64	21%
TOTAL PEMBIAYAAN	309,171,718,088.05	653,536,537,888.77	533,862,041,283.18	650,800,998,070.97	38%



rata rata pertahun adalah sebesar 23 %, ditahun terakhir (tahun 2023) Total Pendapatan kota BALIKPAPAN adalah sebesar Rp. 3,632,425,125,737.23,-

• Rata rata belanja Kota BALIKPAPAN dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) adalah sebesar Rp. 2,753,057,857,272.08,- atau pertumbuhan rata rata pertahun naik sebesar 21 %. Posisi belanja saat ini (2023) adalah sebesar Rp 5,340,465,513,179,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp. 1,001,205,434,193.64,- atau meningkat sebesar 40 % (Pertumbuhan tertinggi)

• Komposisi belanja pada tahun 2023 (tahun terakhir) adalah

URAIAN	Realisasi	%
Belanja Operasi	2,331,395,721,553.33	62.23%
Belanja Modal	1,391,243,269,229.31	37.13%
Belanja Tak Terduga	22,464,664,572.00	0.60%
Belanja Transfer	1,500,000,000.00	0.04%
TOTAL BELANJA	3,746,603,655,354.64	100.00 %

Tabel diatas menunjukan bahwa belanja operasi (62.23%) memiliki proporsi paling tinggi dari total belanja daerah, perbandingan antara belanja operasi dengan belanja modal adalah kurang lebih 2 : 1 (belanja modal hanya sebesar 37.13%)

Proporsi belanja dalam APBD masih belum ideal jika menggunakan pemenuhan Mandat UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP 1 tahun 2024. tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (rata rata selama 4 tahun)

2. ANALISIS HISTORIS: PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN					
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023
	A. Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan Pajak Daerah	425,129,773,688.60	537,494,991,847.32	623,584,889,678.40	715,201,666,945.50
	Pendapatan Retribusi Daerah	49,272,540,221.33	43,879,656,032.77	40,110,966,976.50	52,553,529,809.62
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,174,599,738.41	17,906,485,028.05	11,317,875,622	42,960,450,399.88
	Lain-lain PAD yang sah	118,480,727,255.08	155,781,368,006.65	136,242,023,549.04	155,492,424,385.23
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	609,057,640,903.42	755,062,500,914.79	811,255,755,825.56	966,208,071,540.23
	B. Pendapatan Transfer				
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak	147,855,851,617.00	107,657,869,991.00	125,872,308,062.00	593,652,759,474.00
	Dana Bagi Hasil SDA	678,037,692,130.00	294,774,240,705.00	806,281,723,942.00	741,242,057,000.00
	Dana Alokasi Umum	429,199,860,000.00	428,306,693,000.00	419,347,040,032.00	470,198,907,572.00
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	60,651,273,813.00	57,754,108,356.00	57,431,829,107.00	9,239,248,876.00
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	102,409,438,329.00	92,391,378,280.00	96,020,713,728.00	199,913,051,598.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,418,154,115,889.00	980,884,290,332.00	1,504,953,614,871.00	2,014,246,024,520.00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
	Dana Penyesuaian	0.00	84,211,816,000.00	0.00	0.00
	Dana Insentif Daerah	71,303,699,000.00	0.00	44,427,677,000.00	41,601,904,000.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Desa	0.00	0.00	0.00	0.00



Pertumbuhan rata rata pendapatan kota BALIKPAPAN sebesar 6.78%

	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	71,303,699,000.00	84,211,816,000.00	44,427,677,000.00	41,601,904,000.00
	Transfer Pemerintah Antar Daerah				
	Pendapatan Bagi Hasil	230,943,325,166.00	293,977,313,890.00	381,760,182,087.00	509,462,665,828.00
	Bantuan Keuangan	109,795,000,000.00	84,185,000,000.00	56,665,999,989.00	96,250,000,000.00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	340,738,325,166.00	378,162,313,890.00	438,426,182,076.00	605,712,665,828.00
	Total Pendapatan Transfer	1,830,196,140,055.00	756,324,627,780.00	1,987,807,473,947.00	2,661,560,594,348.00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Pendapatan Hibah	75,971,158,567.00	3,224,000,000.00	4,683,000,000.00	951,000,000.00
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Dana Darurat	0.00	76,714,926,052.90	0.00	0.00
	Pendapatan Lainnya	283,548,238.72	0.00	65,383,891,133.17	3,705,459,849.00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	76,254,706,805.72	79,938,926,052.90	70,066,891,133.17	4,656,459,849.00
	TOTAL PENDAPATAN	2,515,508,487,764.14	1,591,326,054,747.69	2,869,130,120,905.73	3,632,425,125,737.23

Proposi Pendapatan rata rata transfer sebesar 68.21%, pendapatan asli daerah rata rata sebesar 29.61% dan lain-lain pendapatan daerah yang syah rata rata sebesar 1.34%, hal ini menunjukan bahwa kemandirian keuangan daerah di kota BALIKPAPAN sangat baik

Kesimpulan pendapatan daerah :

- Pendapatan asli daerah Kota BALIKPAPAN rata rata pertahun sebesar Rp. 785,395,992,296.00,- atau 29.61% dari total pendapatan, hal ini menunjukan pengelolaan pendapatan asli yang dikelola oleh pemerintah kota BALIKPAPAN masih kurang optimal sehingga kebutuhan pendanaan ditunjang oleh dana transfer.
- Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer kota BALIKPAPAN masuk dalam kategori tinggi

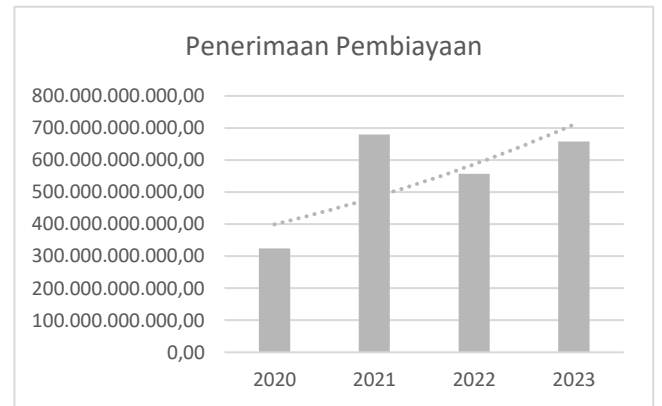
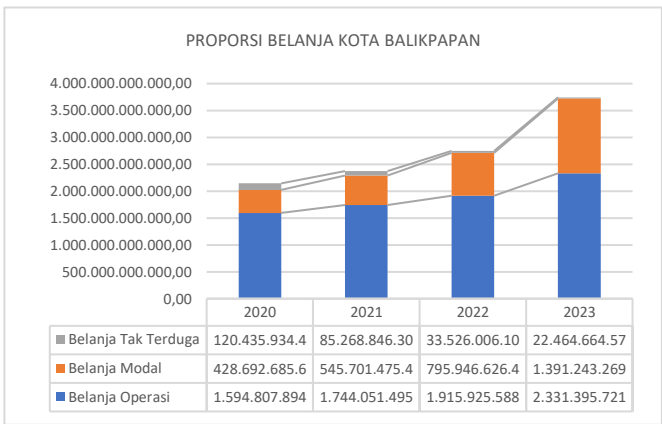
BELANJA						
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
	Belanja Operasi	1,594,807,894,013.19	1,744,051,495,995.96	1,915,925,588,616.51	2,331,395,721,553.33	14%
	Belanja Modal	428,692,685,694.51	545,701,475,495.62	795,946,626,435.12	1,391,243,269,229.31	49%
	Belanja Tak Terduga	120,435,934,469.68	85,268,846,303.70	33,526,006,109.37	22,464,664,572.00	-41%
	TOTAL BELANJA	2,143,936,514,177.38	2,375,021,817,795.28	2,745,398,221,161.00	3,745,103,655,354.64	21%

Belanja daerah kota BALIKPAPAN rata rata pertumbuhan selama 4 tahun (2020 – 2023) sebesar 21%

Proporsi belanja terbesar yaitu pada belanja operasi, rata rata pertahun sebesar Rp. 1,896,545,175,044.75,- atau sebesar 68.91%. dari total belanja berdasarkan grafik diatas bahwa belanja operasi setiap tahunnya meningkat dengan pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 14% sampai tahun 2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase (%)
2020	4,377,485,212,985	4,128,912,545,760	-248,572,667,225.00	5.68%
2021	5,336,565,925,505	4,764,045,946,156.89	-572,519,979,348.11	10.73%
2022	5,218,296,302,859	4,871,946,697,040.00	-346,349,605,819.00	6.64%
2023	5,702,916,601,809	5,340,465,513,179.00	-362,451,088,630.00	6.36%
Rata-rata			-382,473,335,255.53	

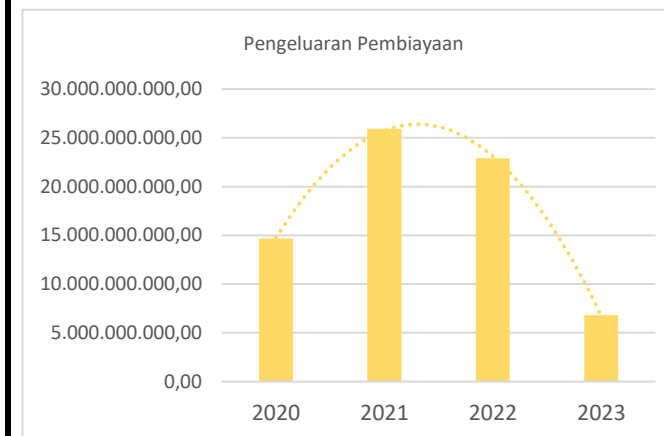
Berdasarkan data tersebut diatas dapat dianalisa bahwa Belanja Daerah Kota BALIKPAPAN tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan adanya selisih kurang (bersaldo negatif) yang menunjukkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran pada Pemerintah Kota BALIKPAPAN karena realisasi yang dicapai tidak melebihi anggaran. Hal ini menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai



Pembiayaan Kota BALIKPAPAN

N O	URAIAN	2020	2021	2022	2023
3	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan				
	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	323,831,718,088.0 5	679,472,471,074.8 1	556,781,496,283.1 8	0.00
	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0.00	0.00	0.00	657,612,998,070.9 7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	323,831,718,088.0 5	679,472,471,074.81	556,781,496,283.18	657,612,998,070.9 7
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14,660,000,000.00	25,935,933,186.04	22,919,455,000.00	6,812,000,000.00
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14,660,000,000.00	25,935,933,186.04	22,919,455,000.00	6,812,000,000.00
	TOTAL PEMBIAYAAN	309,171,718,088.0 5	653,536,537,888.77	533,862,041,283.18	650,800,998,070.9 7

Penerimaan pembiayaan kurun waktu 2020 – 2023 cenderung terjadi kenaikan. Kenaikan Penerimaan pembiayaan kontribusi terbesar berasal dari Penggunaan SILPA



Pengeluaran pembiayaan kurun waktu 2020 – 2023 cenderung terjadi kenaikan pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Kenaikan tersebut karena adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk kegiatan pelayanan public melalui Perusahaan daerah

Kesimpulan belanja daerah

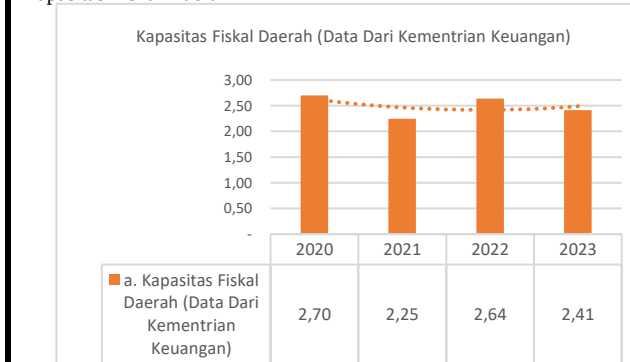
- Bahwa kecenderungan proporsi belanja daerah kota BALIKPAPAN lebih kepada belanja operasi Rp. 1,896,545,175,044.75,- atau sebesar 68.91% . Hal ini menunjukan bahwa proses penganggaran masih terdapat kelemahan dimana proporsi belanja modal masih kecil.

3. ANALISIS RASIO

Analisis Rasio Kota BALIKPAPAN

N O	RASIO	HASIL / NILAI					ANALISIS SEMENTARA
		2020	2021	2022	2023	Rata-Rata	
1	OTONOMI FISKAL						
	a. Kapasitas Fiskal Daerah (Data Dari Kementrian Keuangan)	2.70	2.25	2.64	2.41	2.50	
		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	b. Derajat Otonomi/Derajat Desentralisasi Fiskal	24.21	47.45	28.28	26.60	31.63	Pemerintahan Kota Balikpapan rata-rata penilaian derajat otonomi Fiskal sebesar 31,63% ini berarti Pemda Kota Balikpapan masih bergantung kepada Pemerintah Pusat

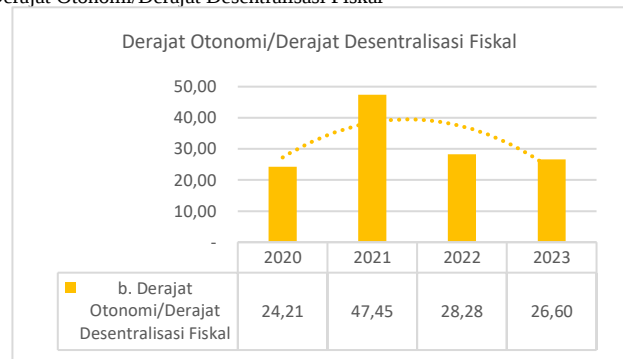
Kapasitas Fiskal Daerah



							dalam menghasilkan PAD
	c. Tingkat Ketergantungan	72.76	47.53	69.28	73.27	65.71	Pemerintahan Kota Balikpapan rata-rata penilaian tingkat ketergantungan sebesar 65,71% ini berarti Pemda Kota Balikpapan masih bergantung kepada pemerintah pusat
	d. Kapasitas Riil Pendanaan	66.30%	33.06%	72.98%	76.17%	62.13%	Rata-rata nilai Kapasitas Riil Pendanaan sebesar 62,13% ini berarti uang daerah bisa digunakan untuk mendanai Pembangunan
2	KELAYAKAN KREDIT						
	a. Solvabilitas	287.6	154.4	285.7	270.5	249.53	Rata-rata nilai solvabilitas sebesar 249,53 artinya 249,53 dimana Aset Pemda mempunyai kemampuan membayar hutang sebanyak 249,53 kali
	2. Quick Ratio	22.26	11.45	21.36	17.53	18.15	Rata-rata nilai Quick Ratio sebesar 18,15. Artinya Pemda dapat membayar hutang dengan cepat 18,15 kali dari jumlah hutang jangka pendek sekarang

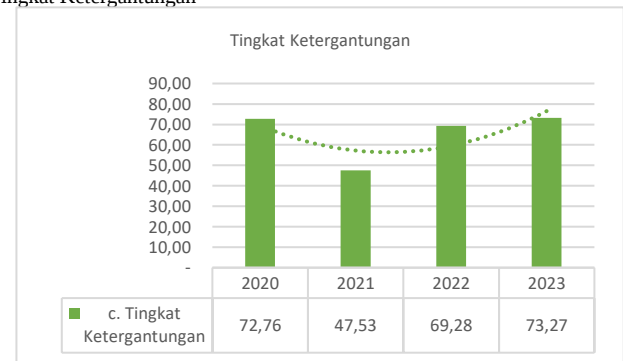
Kapasitas Fiskal berdasarkan data kementerian keuangan Kota BALIKPAPAN termasuk kedalam kategori sangat tinggi, artinya bahwa kemampuan keuangan untuk pengelolaan kota sangat tinggi tetapi jika dilihat tren tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan

Derajat Otonomi/Derajat Desentralisasi Fiskal



Derajat Otonomi kota BALIKPAPAN rata rata sebesar 31,36% masih berada dalam kategori SEDANG tetapi pada tahun 2021 menjadi kategori sangat tinggi. Dalam kurun waktu 2 tahu treakhir kota Balik papan kecenderungan kearah ketergantungannya tinggi terhadap dana transfer pusat

Tingkat Ketergantungan



Tingkat Ketergantungan terhadap dana pusat kota BALIKPAPAN sebesar 65,31 % diatas ketentuan 40% , kecenderungan ketergantungan terhadap dana transfer selama kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) tetapi menunjukan adanya penurunan

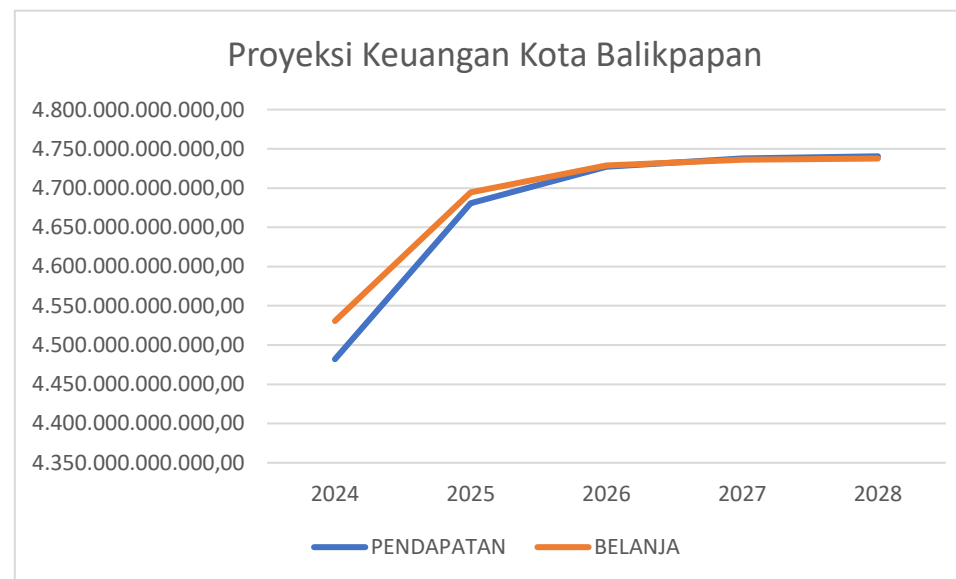
Dari hasil analisis rasio kota BALIKPAPAN:

Bahwa Kemampuan atau kapasitas fiskal dan derajat otonomi kota BALIKPAPAN masuk kedalam kategori sangat tinggi (Mandiri), tetapi dana transfer dari pemerintah pusat dalam kategori ketergantungan sedang terhadap dana pusat
 Dari hasil analisis kota BALIKPAPAN dapat dioptimalkan lagi derajat otonominya melalui pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.

4. PROYEKSI KEUANGAN / PROGRAMAN INVESTASI

Proyeksi Keuangan

URAIAN	PERTUMBUHAN	2024	2025	2026	2027	2028
PENDAPATAN	23.4%	4,481,957,184,914.36	4,680,641,175,523.33	4,727,108,319,050.01	4,737,975,804,753.87	4,740,517,433,882.76
BELANJA	20.9%	4,530,593,635,864.39	4,694,646,294,239.73	4,728,974,889,488.50	4,736,158,268,675.55	4,737,661,416,012.96



Berdasarkan grafik diatas Proyeksi pendapatan belanja kota BALIKPAPAN diproyeksikan sampai dengan tahun 2028, menunjukan terjadi peningkatan sangat signifikan pada tahun 2025 dan perangsung kenaikan mandatar sampai dengan tahun 2028.

Berdasarkan hasil analisis perlu adanya prioritas dalam mengoptimalkan pendapatan.

Dengan demikian maka perlu adanya perencanaan yang baik dari sektor keuangan melalui sasaran/program pembangunan jangka menengah daerah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya dari sisi profesionalitas
2. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Peningkatan Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan

5. RENCANA PENINGKATAN KEUANGAN KOTA

1. Melakukan optimalisasi potensi pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan (belanja daerah)
3. Kerjasama pengelolaan kota dengan pihak lainnya
4. Meningkatkan peran Pihak ke 3 dalam pengembangan kota melalui dana investasi berdasarkan potensi daerah

*) Pada laporan ringkasan dilampirkan dokumen Perkada tentang penjabaran APBD per tahun (2020-2023)
dalam mengisi form laporan ringkasan Pengembangan MFSa ini dapat berimprovisasi sesuai dengan kondisi daerah

MATRIX ANALISIS KEBUTUHAN PENGUATAN KAPASITAS

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA

NO	URAIAN PERMASALAHAN HASIL ANALISIS	KEBUTUHAN PELATIHAN			SASARAN	TUJUAN PENCAPAIAN	JENIS PELATIHAN	MATERI PELATIHAN	NARASUMBER AHLI
		YA	TIDAK	PEMBERIAN MODUL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Pendapatan								
1	Kurang nya pengetahuan dasar tentang pengelolaan pendapatan		✓	✓	Staf pengelola	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan pendapatan daerah	-	Modul Dasar Pengelolaan Pendapatan Daerah	LMS
2	Rendahnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi	✓		✓	staf pengelola sektor pajak	Optimalisasi Capaian pendapatan dari sektor pajak	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Strategi Optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak	
3	Kurangnya inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi	✓		✓	staf pengelola sektor pelayanan pajak dan retribusi	Optimalisasi Capaian pendapatan dari sektor	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Strategi Optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi	
II	Belanja								
1	Kurang nya pengetahuan dasar tentang pengelolaan belanja		✓	✓	Staf pengelola	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan belanja daerah	-	Modul Dasar Pengelolaan belanja daerah	LMS
2	Adanya Gap antara perencanaan dengan realisasi dalam pengelolaan belanja	✓		✓	Staf pengelola perencanaan pembangunan	Meningkatkan Efektifitas dalam perencanaan	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran keuangan daerah	
3	Adanya Gap antara belanja operasi dengan belanja modal yang terlalu jauh	✓		✓	Staf Pengelola	Meningkatnya kemampuan staf dinas dalam pengelolaan belanja dan meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan kota	Pelatihan Kompetensi Keahlian	Efektifitas Pengelolaan proporsi belanja daerah yang ideal	
III	Peran Pihak ke-3 dalam pengelolaan kota								
1	Kurangnya Kerjasama kemitraan dengan pihak lainnya dan keterlibatan pihak ke-3 dalam percepatan Pembangunan kota	✓		✓	Staf pengelola	Meningkatnya pertumbuhan ekonom daerah	Seminar	Strategi peningkatan investasi pihak ke-3 dalam Pembangunan kota	